



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL DAN
JUMLAH KAMAR HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
HOTEL
(STUDI KASUS DI KOTA BUKITTINGGI)**

SKRIPSI



**SAIFUL HAQ
0910532109**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014**

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

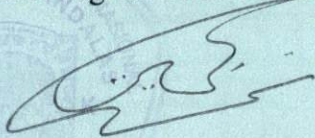
Nama : **SAIFUL HAQ**
No. BP : 0910532109
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : **Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel. (Studi kasus di Kota Bukittinggi)**

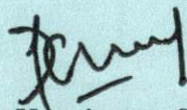
Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 28 Januari 2015

Pembimbing

Kepala Program Studi Akuntansi


Verni Juita, SE, CA, M.Com (Adv) Ak
NIP.197906182002122004


Rahmat Kurniawan, SE, MA, AK, CA
NIP. 198311172006041004

	No Alumni Universitas	SAIFUL HAQ	No Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 21 November 1989 b). Nama Orang Tua : Usmar Marlen dan Fitri Indrawati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 0910532109 f). Tanggal Lulus : 27 Januari 2015 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 2,79 i). Lama Studi : 5 Tahun 6 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Adinegoro No. 18a Bukittinggi</p>		

The impact of the number of tourists, the number of hotels, and the number of hotel rooms for hotel income tax. (Case study in Bukittinggi City)

Skripsi Oleh Saiful Haq

Pembimbing Skripsi Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak, CA

ABSTRACT

This study aims to determine how the impact of the number of tourists, the number of hotels, and the number of hotel rooms for hotel income tax. The study was conducted in Bukittinggi City with 2002 to 2012 data. The used data are secondary data obtained from agencies and government institution.

Research results show that the number of tourists, the number of hotels and the number of hotel rooms, a positive and significant effect for tax revenue hotels in Bukittinggi City. The number of tourists, the number of hotels and the number of hotel rooms has the ability to explain the hotel tax revenue amounted to 91.4%.

Key Word : Hotel's Tax, Tourist, Hotel


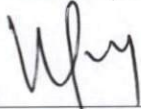
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel. Penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi dengan data tahun 2002 sampai tahun 2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari dinas-dinas dan instansi pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah kamar hotel berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak hotel pada Kota Bukittinggi. Jumlah wisatawan, jumlah hotel dan jumlah kamar hotel memiliki kemampuan dalam menjelaskan penerimaan pajak hotel sebesar 91,4%.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Wisatawan, Hotel

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Desember 2014, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Nama Terang Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak, CA	Dra. Warnida, MM, Ak

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel. (Studi kasus di Kota Bukittinggi)"**. Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang,
Desember 2014

Yang membuat
pernyataan

Saiful Haq
Bp:0910532109

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing, memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, dan keyakinan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL DAN JUMLAH KAMAR HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL (STUDI KASUS DI KOTA BUKITTINGGI)”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Ayahanda H. Usmar Marlen dan Ibunda Hj. Fitri Indrawati, yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi nasehat, perhatian, dorongan, cinta dan kasih sayang serta doa yang takkan pernah bisa penulis balas
2. Saudara/i penulis, Fajrul Huda, S.ds, Zulfa Rahmi, S.Kom, Hizbur Rahman, S.E, Nidaul Khairat, Misbahul Azman terima kasih atas segala perhatian, motivasi, kasih sayang serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MA, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

4. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Firdaus SE, Msi, Ak selaku Sekretasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan selaku pembimbing akademik yang telah menjadi pembimbing terbaik selama kuliah penulis.
6. Bapak Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak, CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Selain itu pembimbing juga mengucapkan terima kasih atas segala motivasi yang telah diberikan selama bimbingan.
7. Ibu Warnida SE, MM, Ak selaku penelaah dan telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi..
8. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir, serta kepada para pegawai biro akuntansi yang telah membantu urusan penulis selama masa perkuliahan. Dan keluarga besar Akuntansi Universitas Andalas yang telah membantu dan memberikan informasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sanak family penulis, baik keluarga dari pihak ibu maupun pihak ayah yang tidak dapat dituliskan seluruhnya oleh penulis, terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
10. Sahabatku dari "Vasthel" Emil, Kiki, Fuad, Funny, Idhep, Adek, Cugik, Prancis, Bayak, Botak, dan yang lainnya terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, dan semangat yang kalian berikan.

11. Terima kasih my brader Ricky Batrison, SE atas perhatian, support, semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta banyak bantuan yang telah diberikan tanpa bisa saya menyebutkannya satu per satu.
12. Terimakasih Squad Management Mami Anye, Ari Senyo dan seluruh anggota yang telah banyak memberikan pelajaran dan prestasi serta menghabiskan banyak waktu bersama kalian.
13. *Konco sapalalokan* dan seiman Kiki, Comoy, Ijonk, Darom, Damon, Hengky, Codoik. Rombongan pulau dan adek-adek PKU Amel, Irna, Batak, Nabi, Kudo, Cau, Alai, Kiki, Ariel
14. Teman seperjuang Jeka, Putra, Ocki, Edo, Adi, Rian, Rizkun, Rizky, Ajo, Zori, Windi, Fajar, Anggi, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, terimakasih atas bimbingan dan kebersamaan selama ini.
15. Teristimewa kepada Lusi Wahyuni (sysy) yang telah menjadi Penyemangat dan inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, tiada kata indah yang pantas terucapkan dan tiada sesuatu yang pantas penulis berikan untuk membalas budi baik kecuali hanya doa, semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya

skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Semua ini karena keterbatasan pengetahuan penulis, maka saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, Desember 2015
Penulis

Saiful Haq
Bp:0910532109

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1. Perpajakan Secara Umum	10
2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.3 Pembagian Jenis Pajak	15
2.1.1.4 Sumber Penerimaan Pajak Daerah.....	18
2.1.2. Pajak Daerah	19
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	19
2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	19
2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	23
2.1.3. Pajak Hotel.....	24
2.1.3.1 Pngertian Pajak Hotel.....	24
2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel.....	27
2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	28
2.1.3.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan	

Wilayah Pemungutan pajak	29
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Hipotesis	35
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Variabel Penelitian.....	36
3.1.1 Variabel Dependen	36
3.1.2 Variabel Independen	36
3.2 Populasi Penelitian.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5 Metode Analisi Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN MBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Administratif.....	43
4.1.2 Visi dan Misi Kota Bukittinggi.....	46
4.1.2.1 Visi	46
4.1.2.2 Misi	47
4.1.3 Hotel di Kota Bkittinggi.....	48
4.2 Statistik Deskriptif	42
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.1 Uji Normalitas.....	50
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	52
4.3.3 Uji Autokolerasi	53
4.3.4 Uji Heterokedasitas	53
4.4 Uji Hipotesis	55
4.4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda	55
4.4.2 Uji F	56
4.4.3 Uji T.....	57
4.4.4 Koefisien Determinasi	59
4.5 Analisis	59
4.5.1 Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	59

4.5.2	Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	60
4.5.1	Jumlah Kamar Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	61

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 63

5.1	Kesimpulan	63
-----	------------------	----

5.2	Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	63
-----	--	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.2 Uji Normalitas	50
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4.4 Uji Autokolerasi	53
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.6 Uji F	57
Tabel 4.7 Uji T	57
Tabel 4.8 Uji R Square	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Regresi Normal P-Plot.....	51
Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu negara terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan - pendapatan pemerintah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk penting untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan kenegaraan, dimana dana adalah merupakan penggerak segala kegiatan dan aktifitas yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Tanpa dana, maka segala program dan kegiatan negara akan terbengkalai, bahkan tujuan Pembangunan Nasional yang didambakan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak akan tercapai.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004

adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (penerimaan bangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMN).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan yang antara lain berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan

retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak propinsi dan Pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Jenis-jenis pajak propinsi ditetapkan sebanyak 4 jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Walaupun demikian, daerah propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah propinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah propinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak. Walaupun demikian, daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah kabupaten/kotatersebut dipandang kurang memadai. Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7. Pajak parkir.

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari beberapa jenis pajak saja. Pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah, penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja. (Betty Rahayu, 2010).

Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

Peraturan daerah tentang pajak hotel itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005, h. 245). Sebagai pusat akomodasi pariwisata, kota Bukittinggi merupakan lahan yang baik untuk

berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa perhotelan. Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah di Kota Bukittinggi.

Melihat semakin pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Pajak Hotel.

1.2. Rumusan Masalah

Pajak hotel bagi daerah merupakan pos pendapatan pajak dengan potensi yang tinggi bagi Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata. Berdasarkan penelitian Nugraha (2012), Widiatmoko (2009), Karim dan Madris (2011), Ginting (2010), dan Tamam (2012) faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah wisatawan, jumlah kamar, dan tingkat hunian hotel. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi periode 2002-2012?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi periode 2002-2012?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kamar hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi periode 2002-2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi periode 2002-2012.
2. Menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi periode 2002-2012.
3. Menganalisis pengaruh jumlah kamar hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi periode 2002-2012.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi pengembangannya.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel.
3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak hotel.

4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi yang dibahas pada skripsi ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen, hasil analisis data,

dan interpretasi terhadap hasil berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan Secara Umum

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Ilyas (2000 dalam Suhendi, 2008, h.33) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengertian atau definisi perpajakan sangat

berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, h.658). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein, 2005).

Menurut Sudarsono (1994) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang menurut peraturan dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk penggunaannya dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

2.1.1.1. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurksel, 1971 dalam Muklis, 2002).

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangannegara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur), (Resmi, 2004, h.2).

1. Fungsi *Budgetary* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2.1.1.2 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (dalam Waluyo, 2008), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2008) adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas yang berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Menurut Nugraha (2012), ada beberapa asas pajak yang dianut dari zaman ke zaman yaitu :

1. Asas Sumber Penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

2. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena asas ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang berserta harta bendanya.

3. Teori Bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

2.1.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Pajak menurut golongannya dibagi kedalam dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

2. Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibagi dalam dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan

keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi dalam dua bagian, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan untuk membiayai rumah tangga negara.

i. Pajak Penghasilan

ii. PPN (penyerahan lokal)

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

iv. Bea Materai

v. Bea Lelang

vi. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

b. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari :

i. Pajak daerah Tingkat I (Propinsi)

Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ii. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten)

Contohnya adalah Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.1.4 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya.

Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Hasil pajak daerah

- b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 2. Dana Perimbangan
 - 3. Pinjaman Daerah
 - 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan

logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Saat ini sistem pemungutan pajak daerah menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujud dari sistem withholding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain perusahaan listrik negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang pajak daerah, sebagai pemungut pajak penerangan

jalan atas pengenaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Selain memungut pajak, pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

Seperti halnya pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.3. Pajak Hotel

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 91 tahun 2010 pengertian pajak hotel dan restoran adalah Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas

lainnya dengandipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

Berdasarkan Perda Kota Bukittinggi No.7 tahun 2012 tentang pajak hotel dan Perda Kota Bukittinggi No.8 tahun 2012 tentang restoran dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajakhotel dan restoran.

1. Dengan nama pajak hotel, restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
2. Subjek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005,h. 245).

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005,h. 246).

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk obyek pajak hotel antara lain :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar

sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing,

dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$
$$= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel}$$

2.1.3.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah

Pemungutan Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian saat ini.

Dalam bagian ini dijelaskan objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu, variabel serta metode yang digunakan, serta hasil dari penelitian tersebut.

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Saleh dan Madris (2011), dalam jurnal penelitiannya tentang pajak hotel, menyimpulkan bahwa hanya variabel jumlah hunian kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan.
2. Vidria (2009) menyatakan wisatawan, tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menerangkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang.
3. Ardiansyah (2005) dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989–2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%.
 - b. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabuapten Purworejo pada tahun anggaran 1989 - 2003 yaitu naik turun antara 24,66 persen sampai dengan 27,29 persen.
4. Qadarrochman (2010), penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata sebagai variabel dependen serta empat variabel independen meliputi jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita. Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa secara keseluruhan semua variabel independen berpengaruh signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 85 persen.

Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	A. Azinar Muqaddas Karim Saleh dan Madris (2011)	Uji linear berganda	Jumlah hunian kamar, Tarif rata-rata kamar, PDRB deflator	Jumlah hunian kamar berpengaruh signifikan, tarif rata-rata kamar tidak berpengaruh signifikan, PDRB deflator tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel.
2	Vidria (2009)	Uji linear berganda	Jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan	Jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang

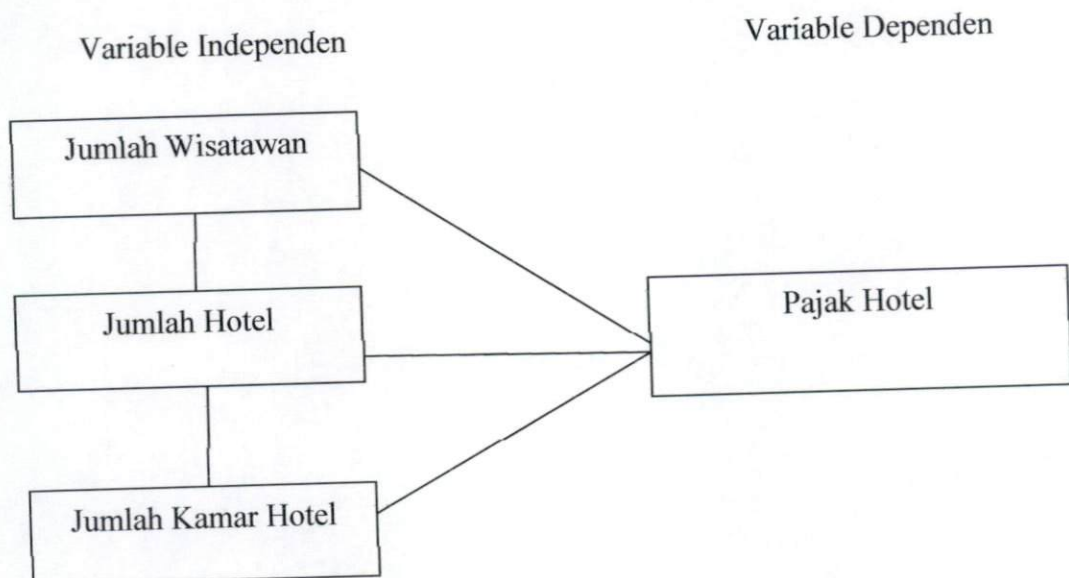
			fasilitas penunjang	berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel
3	Ardiansyah (2005)	Analisis deskriptif	Jumlah Hotel dan Restoran, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wisatawan Nusantara	Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989–2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%., Tingkat efesiensi pajak hotel dan restoran di Kabuapten Purworejo pada tahun anggaran 1989 - 2003 yaitu naik turun antara 24,66 persen sampai dengan 27,29 persen
4	Qadarrochman (2010)	regresi linear berganda	obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita	semua variabel independen berpengaruh signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 85 persen.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah dengan mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Hotel. Faktor-faktor yang di duga mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Bukittinggi banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel

Keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2: Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Badru Tanam (2012) mengatakan bahwa jumlah kamar hotel merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Perhotelan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3: Jumlah Kamar Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Hotel yang disimbolkan dengan Y. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel penelitian yang memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh seorang peneliti untuk menetapkan/menentukan hubungan antara fenomena yang sedang diamati. Pada penelitian ini, terdapat tiga variabel independen, yaitu :

1. Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Bukittinggi tahun 2002-2012. Data jumlah kunjungan wisatawan diukur dalam satuan orang.

2. Jumlah Hotel

Jumlah hotel adalah banyaknya penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Data jumlah hotel di Kota Bukittinggi tahun 2002-2012 diukur dalam satuan unit.

3. Jumlah Kamar Hotel

Jumlah kamar hotel adalah banyaknya jumlah kamar hotel berbintang dan melati di Kota Bukittinggi. Data jumlah kamar hotel di Kota Bukittinggi tahun 2002-2012 diukur dalam satuan unit.

3.2. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa (Rahmanto, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kota Bukittinggi.

3.3 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). dalam hal ini data diperoleh dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pusat Statistik. Untuk mendapatkan data seperti data realisasi anggaran pendapatan pajak hotel di Kota Bukittinggi, data jumlah hotel dan data jumlah wisatawan.

3.4 Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi putaka.

Metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi.

3. Wawancara tidak terstruktur.

3.5 Metode analisis data

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil dari analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003).

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2001:19).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi linear berganda yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik ini terdiri atas 3 macam, yaitu:

a. Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik.

b. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (*keeratan*) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Dengan cara lain untuk menentukan multikolinieritas, yaitu dengan Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang

dibenarkan secara statistik dan Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

c. Uji autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW). Uji Durbin-Watson adalah statistik uji yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi (hubungan antara nilai-nilai error dengan waktu tertentu) dalam residual (kesalahan prediksi) dari analisis regresi.

d. Uji Heterokesidasitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut homoskedastisitas. dan jika variannya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskidastisitas

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil dari analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + X1 + X2 + X3 + e$$

Di mana:

Y = Pajak Hotel

α = Konstanta

X1 = Jumlah Wisatawan

X2 = Jumlah Hotel

X3 = Jumlah Kamar Hotel

e = error

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara bersama sama terhadap variable terikat. *Significant* berarti hubungan yang terjadi, hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat diartikan terdapat pengaruh yang *significant* antara variabel bebas dengan variabel terikat, namun jika nilai sig $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang *significant* antara kedua variabel.

b. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji secara parsial masing masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau *significance* $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

c. Koefisien Determinasi (Adjusted R square)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel bebas secara bersama sama. Hasil perhitungan Adjusted R square dapat dilihat pada output Model Summary. Pada kolom Adjusted R square dapat diketahui beberapa presentase yang dapat dijelaskan oleh variabel variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel variabel lain yang tidak dimasuka kedalam model penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Posisi Kota Bukittinggi terletak antara $100^{\circ}20'$ BT dan $00^{\circ}16' - 00^{\circ}20'$ LS dengan ketinggian sekitar 780 – 950 meter dari permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Luas Kota Bukittinggi lebih kurang $25,239 \text{ Km}^2$, luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit dan di beberapa kawasan memiliki keterjalan hampir vertikal seperti di kawasan sepanjang Ngarai Sianok. Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Pulai Anak Air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang Ngarai Sianok yang membentang dari Utara sampai bagian Selatan di sebelah Barat Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi

Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Selain sebagai kota perjuangan, Bukittinggi juga terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk, dan bersaudara (*sister city*) dengan Seremban di Negeri Sembilan, Malaysia. Seluruh wilayah kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi kota yang berada di tepi Ngarai Sianok.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kota Bukittinggi. Banyaknya objek wisata yang menarik, menjadikan kota ini dijuluki sebagai "kota wisata". Pada tahun 2012, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi kota ini mencapai 26.802 orang. Saat ini di Bukittinggi terdapat sekitar 60 hotel dan 15 biro perjalanan. Hotel-hotel yang terdapat di Bukittinggi antara lain The Hills, Hotel Pusako, dan Grand Rocky Hotel.

Sementara jumlah kunjungan yang tidak terdata yaitu kunjungan yang tidak bermalam di hotel yang ada di Kota Bukittinggi baik dari masyarakat luar kota yang berusaha di Bukittinggi maupun orang-orang yang berkunjung dengan berbagai alasan lainnya yang jumlahnya diperkirakan ± 250.000 orang per harinya (di luar penduduk kota) dan terlebih pada hari libur yang lebih banyak lagi.

Ngarai Sianok merupakan salah satu objek wisata utama. Taman Panorama yang terletak di dalam Kota Bukittinggi memungkinkan wisatawan untuk melihat keindahan pemandangan Ngarai Sianok. Di dalam Taman Panorama juga terdapat gua bekas persembunyian tentara Jepang sewaktu Perang Dunia II yang disebut dengan Lubang Jepang. Untuk mengunjungi nagari Koto Gadang di bawah ngarai, wisatawan bisa melalui Janjang Koto Gadang. Janjang

yang memiliki panjang sekitar 1 km ini, memiliki desain seperti Tembok Besar China.

Di Taman Bundo Kanduang terdapat replika Rumah Gadang yang berfungsi sebagai museum kebudayaan Minangkabau. Kebun binatang Bukittinggi dan benteng Ford De Kock, dihubungkan oleh jembatan penyebrangan yang disebut Jembatan Limpapeh. Jembatan penyebrangan Limpapeh berada di atas Jalan A. Yani yang merupakan jalan utama Kota Bukittinggi.

Pasar Ateh (Pasar Atas) berada berdekatan dengan Jam Gadang yang merupakan pusat keramaian kota. Di Pasar Ateh terdapat banyak penjual kerajinan tangan dan bordir, serta makanan kecil oleh-oleh khas Sumatera Barat.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar; Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam.

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi adalah :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 ha) atau 27,06 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

4.1.2.1. Visi

Periode 2011 – 2015 adalah periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006 – 2025. Pada periode pertama, 2006 – 2010, telah diletakkan dasar-dasar pembangunan untuk menuju cita-cita pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD dimaksud. Berangkat dari hasil capaian kinerja pembangunan periode 2006 – 2010, maka untuk kesinambungan pembangunan dan terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pada periode kedua RPJPD 2006 – 2025 ini, maka visi pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2011 – 2015 adalah :

“Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat Dan Berekonomi Mapan Dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama Dan Adat”

Makna pokok yang terkandung dari visi di atas, pada periode 2011 – 2015

Pemerintah Kota Bukittinggi akan mewujudkan :

1. Masyarakat Yang Cerdas
2. Kecerdasan adalah awal kesuksesan, yang akan mengeluarkan masyarakat dari belenggu kemiskinan, dan mampu bersaing dengan dunia global. Masyarakat Bukittinggi yang cerdas, adalah masyarakat yang berpendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Masyarakat yang sehat, masyarakat Bukittinggi yang sehat adalah masyarakat yang terbebas dari kesakitan serta memiliki status gizi yang baik.
4. Masyarakat Bukittinggi yang berekonomi mapan, Masyarakat Bukittinggi yang berekonomi mapan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak sesuai kebutuhan untuk mengikuti perkembangan dunia.

Nilai-nilai agama dan adat harus melandasi perwujudan masyarakat yang cerdas, sehat dan berekonomi mapan. Nilai-nilai agama dan adat dengan filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dijadikan landasan dalam setiap proses pembangunan, sehingga lebih bermakna dan diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

4.1.2.1. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 4 misi yang akan dilakukan dan ingin dicapai yang mendasarinya kepada nilai-nilai agama dan adat. Misi tersebut yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance* and *clean government*.
2. Meningkatkan mutu pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua level tingkatan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang layak, murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
4. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah (perdagangan dan jasa, pariwisata, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan)

4.1.3. Hotel di Kota Bukittinggi

Sebagai kota wisata, Kota Bukittinggi memiliki 60 hotel dengan total kamar 1.593 mulai dari hotel berbintang hingga kelas melati. Dari 60 hotel tersebut, 15 diantaranya adalah hotel berbintang. Terdapat tiga hotel bintang 4, yaitu hotel The Hills, Hotel Pusako dan Grand Rocky. Hotel dengan kamar terbanyak di Kota Bukittinggi adalah hotel Pusako dengan 155 kamar.

Hotel di Kota Bukittinggi merupakan sarana penunjang yang utama dari sektor pariwisata. Hingga saat ini hotel di Kota Bukittinggi terus bertambah dengan beberapa hotel yang sedang tahap pembangunan. Pada musim libur, hotel di Kota Bukittinggi selalu penuh dari jauh hari dan sering kali tidak mampu menampung wisatawan yang ingin beristirahat di hotel Kota Bukittinggi.

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil data tersebut akan ditampilkan di dalam tabel statistik deskriptif untuk masing masing variabel.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	11	1.923.019.129	6.308.002.760	3.600.774.719,27	1.508.813.007,808
X1	11	155.312	389.005	268.346,36	78.466,494
X2	11	49	61	54,91	3,807
X3	11	1.189	1.593	1.298,27	118,377
Valid N (listwise)	11				

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan data masingmasing variabel pada tahun 2002 - 2012 yang telah diolah dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Nilai rata – rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel selama tahun 2002 sampai 2012 pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata rata variabel jumlah wisatawan adalah sebanyak 268.346,36 nilai rata rata jumlah hotel adalah sebanyak 54,91, dan nilai rata rata jumlah kamar hotel adalah sebanyak 1.298,27.

Dari data diatas diketahui nilai rata rata variabel jumlah wisatawan yang diukur dalam satuan orang sebesar 268.346,37 yang menunjukkan bahwa rata rata

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi setiap tahunnya berkisar sebanyak 268.346,36. Dari data diatas diketahui rata rata variabel jumlah hotel yang diukur dalam satuan satuan unit adalah sebanyak 54,91 yang menunjukkan bahwa rata rata jumlah unit hotel yang ada pada Kota Bukittinggi berkisar sebanyak 54,91. Dari data diatas diketahui juga nilai rata rata jumlah kamar hotel yang diukur dalam satuan unit sebesar 1.298,27 yang menunjukkan bahwa rata rata jumlah unit kamar hotel yang ada di Kota Bukittinggi berkisar sebanyak 1.298,27

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas data sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model model statistik parametik, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan di dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normal kolmogorov smirnov.

Tabel 4.2

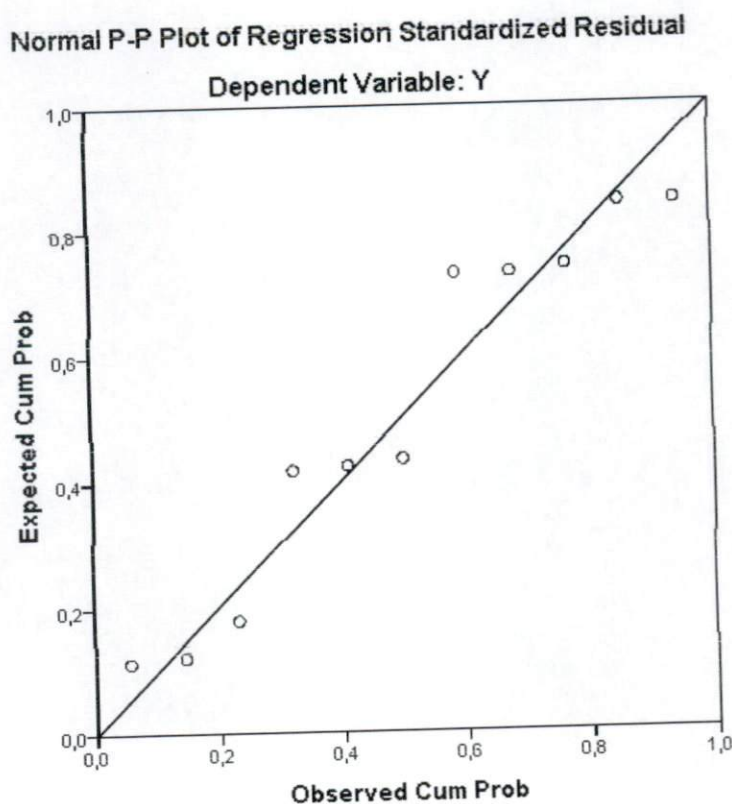
Uji Normalitas

No	Variabel	Assymp. Sig	α	Penjelasan
1	X1	0,20	0,05	Normal
2	X2	0,06	0,05	Normal
3	X3	0,20	0,05	Normal
4	Y	0,143	0,05	Normal

Standar dari tes ini adalah nilai Assymp. Sig harus lebih dari 0,05. Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai dari Assymp Sig besar dari 0.05 menunjukkan bahwa data normal. Hasil dari uji kolmogorof smirnov akan digambarkan pada diagram regresi normal p-p plot. Data adalah normal jika distribusi data menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Analisis grafik yaitu dengan menggunakan grafik histogram dan *Normal Probability Plot*. yang menunjukkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal dikarenakan terlihat grafik titik-titik menyebar mendekati dari garis diagonal. Sehingga model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini. Hasil ini diperkuat dengan menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*.

Gambar 4.1

Regresi Normal P-P Plot



Dengan melihat grafik normal plot diatas,dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot menyebar mengikuti arah garis diagonal, maka data memenuhi asumsi normal

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mendeteksi adanya gejala korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dalam penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman untuk mengetahui terbebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10.

Tabel 4.3

Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0,142	1,022
X2	0,211	1,733
X3	0,207	1,826

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa variabel independen tidak melebihi 10 dan nilai VIF berada disekitar angka 1, nilai dari VIF adalah 1,022 1,733 1,826. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinieritas pada variabel-variabel independen.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Pada hasil uji autokorelasi menggunakan program SPSS 15.0, terlihat pada tabel 4.4. Hal ini berarti model regresi diatas tidak terdapat masalah autokorelasi dengan kriteria $-2 < DW < 2$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.4

Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,969 ^a	0,940	0,914	1,33278	1,714

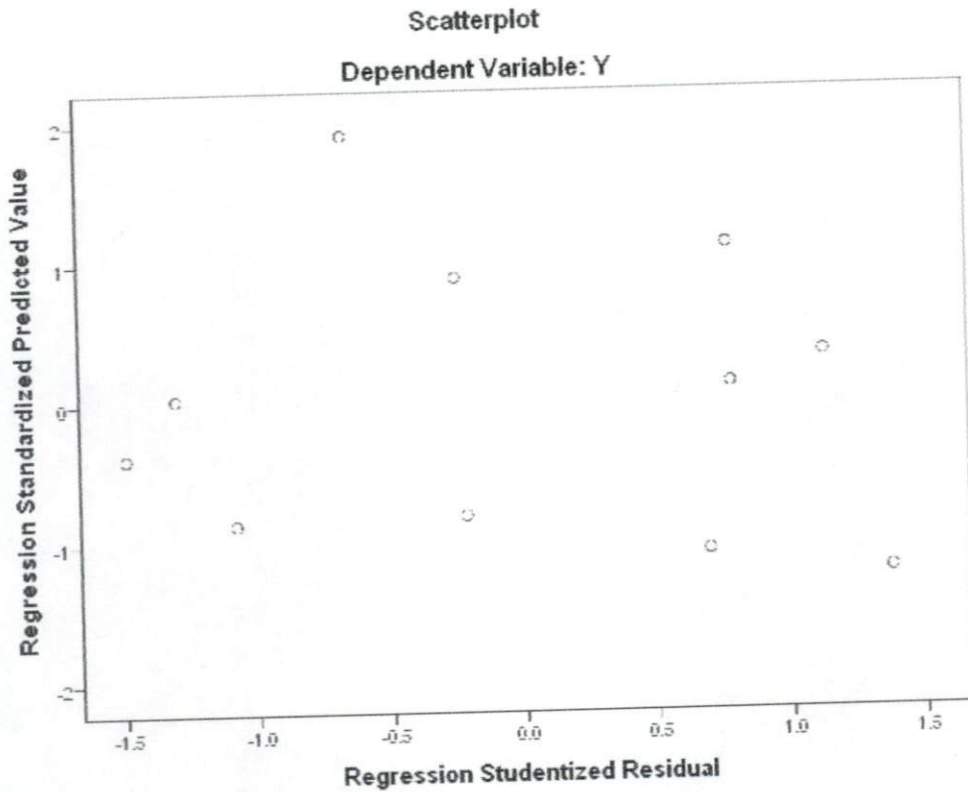
Dari tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai DW untuk variable independent 1,714 jadi nilai dari DW menunjukan bahwa $-2 < 1,714 < 2$. Jadi kesimpulannya tidak ada autokolerasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian.

4.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini dapat dilakukan dengan berbagai uji yang dilakukan. Di bawah ini merupakan hasil dari pengujian heteroskedastisitas dengan melihat grafik *plot*.

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis data.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil dari analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel

independen. Hasil dari analisis regresi berganda bisa dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefficient	
	B	Std. Error
Y		
(Constant)	2.789	0.387
X1	1.148	0.4731
X2	7.090	0.320
X3	4.845	0.674

Berdasarkan tabel 4.6 bisa dibuat persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 2.789 + 1.148 + 7.090 + 4.845 + e$$

1. Koefisien konstanta adalah 2.789 yang artinya Y akan sama dengan 2.789 ketika semua variabel independen bernilai 0.
2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 1.148, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah wisatawan mengalami kenaikan 1.148, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 1.148. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerimaan pajak hotel Kota

Bukittinggi dengan jumlah wisatawan, semakin naik jumlah wisatawan maka semakin naik jumlah penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi.

3. Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 7.090, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah hotel mengalami kenaikan 7.090, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 7.090. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi dengan jumlah hotel, semakin naik jumlah hotel maka semakin naik jumlah penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi.
4. Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 4.845, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah kamar hotel mengalami kenaikan 4.845, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 4.845. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi dengan jumlah kamar hotel, semakin naik jumlah kamar hotel maka semakin naik jumlah penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi.

4.4.2 Uji F

Uji F adalah uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah kamar hotel, apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pajak hotel atau variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

H4: Ada pengaruh antara Jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah kamar hotel terhadap pajak hotel pada Kota Bukittinggi.

Tabel 4.6**Uji F****ANOVA^a**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	213.908	3	7.130	36.317	0.000 ^b
Residual	137.432	7	1.963		
Total	351.340	10			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant).X3,X2,X1

Pada tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai signifikan kecil dari 0,05 yaitu 0,000 yang artinya secara bersama sama variabel independen jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Hal itu berarti H4 diterima.

4.4.3 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen yaitu pajak hotel.

Tabel 4.7**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	2.789	0.387		-0.721	0.495
X1	1.148	0.4731	0.774	3.144	0.016

X2	7.090	0.320	-0,179	-0.885	0.006
X3	4.845	0.674	0.380	1.863	0.003

dependent variable :Y

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa :

1. Jumlah wisatawan terhadap pajak hotel

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,016 kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel.

2. Jumlah hotel terhadap pajak hotel

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,004 kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel.

3. Jumlah kamar hotel terhadap pajak hotel

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa jumlah kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,003 kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel.

4.4.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R square)

Tabel 4.8

Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,969 ^a	0,940	0,914	1.33278

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel bebas secara bersama sama. Hasil perhitungan Adjusted R square dapat dilihat pada output Model Summary. Pada kolom Adjusted R square dapat diketahui beberapa presentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat

Dari tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai dari Adjusted R square untuk model regresi adalah 0,914 atau 91,4% yang menjelaskan bahwa kemampuan dari variable independent dalam menjelaskan pajak hotel adalah 91,4% , dan sisanya 8,6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak masuk dalam penelitian.

4.5. Analisis

4.5.1. Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Wisatawan adalah seseorang yang pergi dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat asalnya dengan tujuan untuk tidak mencari

penghasilan di daerah tersebut. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota andalan tujuan pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai sig. adalah 0.016 kecil dari 0.05, yang berarti bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Pada tabel 4.7 juga menggambarkan nilai B (koefisien regresi) 1.148. Jadi ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan dengan pajak hotel, setiap kenaikan dari jumlah wisatawan akan diikuti oleh kenaikan pajak hotel pada kota Bukittinggi, atau dengan kata lain jika jumlah wisatawan naik, maka jumlah pajak hotel juga akan naik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko (2009), menyimpulkan bahwa Jumlah wisatawan, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menerangkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria Adi Nugraha (2012), menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang

4.5.2 Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Pajak hotel bagi daerah mempunyai potensi yang tinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan mampu mendukung segala aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Mengingat Kota Bukittinggi merupakan kota wisata yang selalu ramai dikunjungi turis dari dalam maupun luar kota, sehingga jumlah hotel di Kota Bukittinggi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hotel pada

kota lain di Sumatera Barat.

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai sig. Adalah 0.006 kecil dari 0.05, yang berarti bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Pada tabel 4.7 juga menggambarkan nilai B (koefisien regresi) 7.090. Jadi ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah hotel dengan pajak hotel, setiap kenaikan dari jumlah hotel akan diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak hotel pada Kota Bukittinggi, atau dengan kata lain jika jumlah hotel naik, maka jumlah pajak hotel juga akan naik.

4.5.3 Jumlah Kamar Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar, berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja, terutama pada Kota Bukittinggi sebagai kota wisata.

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai sig. Adalah 0.003 kecil dari 0.05 , yang berarti bahwa jumlah kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak hotel. Pada tabel 4.7 juga menggambarkan nilai B (koefisien regresi) 4.845 . Jadi ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah kamar hotel dengan penerimaan pajak hotel, setiap kenaikan dari jumlah kamar hotel akan diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak hotel pada Kota Bukittinggi, atau dengan kata lain jika jumlah kamar hotel naik, maka jumlah pajak hotel juga akan naik. Pada kota Bukittinggi jumlah unit kamar hotel meningkat setiap tahunnya karena masyarakat di Kota Bukittinggi merasa beruntung jika memegang aset dalam bentuk riil seperti tanah atau bangunan daripada dalam bentuk uang.

Tabel 4.10

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hasil
H1 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.	Diterima
H2 : Jumlah Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.	Diterima
H3 : Jumlah Kamar Hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.	Diterima

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa :

1. Jumlah wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pajak hotel. Ini digambarkan oleh nilai dari signifikan 0.016 yang kecil dari nilai 0.05 yang berarti bahwa H1 diterima atau terdapat pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap pajak hotel.
2. Jumlah hotel memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pajak hotel. Ini digambarkan oleh nilai dari signifikan 0.004 yang kecil dari nilai 0.05 yang berarti bahwa H2 diterima atau terdapat pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap pajak hotel.
3. Jumlah kamar hotel memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pajak hotel. Ini digambarkan oleh nilai dari signifikan 0.003 yang kecil dari nilai 0.05 yang berarti bahwa H3 diterima atau terdapat pengaruh antara jumlah wisatawan terhadap pajak hotel.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Masih banyak faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pajak hotel khususnya di kota atau daerah dimana tempat tersebut adalah tempat tujuan wisatawan, sehingga untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk bisa menambah variabel independen dengan berbagai faktor lain yang memungkinkan memengaruhi besarnya penerimaan terhadap pajak hotel dan keterbatasan untuk mendapatkan informasi tentang penerimaan pajak hotel dan realisasi pajak hotel

untuk memperkuat informasi di dalam penelitian ini juga penulis temukan dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Satria. 2012. "*Analisis Terhadap Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001-2010)*". Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Bidang Kepariwisata. 2009. Pemerintah Kota Bukittinggi Sumatera Barat. (<http://www.bukittinggikota.go.id/>) diakses 4 Mei 2014.
- Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jhohandewangga. 2012. (<http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/>)
- Katalog BPS. 2004/2005 Bukittinggi Dalam Angka.
- Katalog BPS. 2009 Bukittinggi Dalam Angka.
- Katalog BPS. 2013 Bukittinggi Dalam Angka.
- Mardismo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mardismo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Andi Publisher.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Perda Kota Bukittinggi No.7 tahun 2012 tentang pajak hotel.
- Perda Kota Bukittinggi No.8 tahun 2012 tentang pajak restoran.
- Praditya, Alam. 2009. "*Anlisis Pajak Hotel DAN Potensi Pengembangannya (Studi Kasus Kabupaten Semarang)*". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
- Qodarrahan, Nasrul. 2010. "*Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro
- Resmi, Siti. 2010. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, S. 2001. "Mengolah Data Statistik Secara Profesional". Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Sekaran Uma. (2003). *Research Method For Business*. United state of America. Hermitage Publishing.
- Sony, Udhi. 2011. "*Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar (Januari 1997- Desember 2007)*", Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 81.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Vidya. 2013. "*Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel (Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta)*". Jurnal. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku II*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

1. Data Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel

Tahun	Pajak Hotel	Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar Hotel
2002	2.250.040.895	145.311	52	1.217
2003	1.923.019.129	182.263	50	1.197
2004	2.339.759.959	185.908	49	1.188
2005	2.302.458.518	174.515	52	1.188
2006	3.104.720.669	242.744	57	1.258
2007	3.104.720.669	268.821	56	1.290
2008	4.051.829.301	295.502	57	1.293
2009	4.521.730.891	308.422	57	1.303
2010	4.807.296.902	328.423	57	1.366
2011	5.491.321.627	360.886	57	1.379
2012	6.308.002.760	389.005	60	1.593

2. Daftar Nama-Nama Hotel di Bukittinggi Tahun 2012

No	Nama Hotel	Nama Pemilik/Direktur /Manager	Alamat	Klasifikasi	Jumlah Kamar
1	Hotel The Hills	Yon Hendri	Jl. Laras Dt Bandaro Bkt	Bintang 4	101
2	Hotel Pusako	Dyaksa Lokesworo	Jl. S. Hatta No. 7 Bkt	Bintang 4	155

3	Grand Rocky	Ferry Dermawan	Jl. Yos Sudarso No. 29	Bintang 4	130
4	Royal Denai Internasional	Hj. Dafni Anas, Mrs Anita	Jl. A. Rivai No. 26	Bintang 3	70
5	Hotel Campago	Syafroni Falian	Jl. Cempaka I, Komp Inkorba	Bintang 3	22
6	Hotel Dymens	H. Basir Sulaiman	Jl. Nawawi No. 1-3 Bkt	Bintang 2	48
7	Hotel Grand Malindo	H.Nursal Edison	Jl. Panorama No. 30 Bkt	Bintang 2	56
8	Royal Denai View	Anita, SH	Jl. Yos Sudarso No 7A	Bintang 2	51
9	Hotel Nikita	H. Syafril, Amd	Jl. Sudirman No. 55 Bkt	Bintang 1	31
10	Hotel Bagindo	Eddy Khatib	Jl. Sudirman No. 45 Bkt	Bintang 1	23
11	Hotel Benteng	H. Yuliar Manik, Yarno Malin	Jl. Benteng No. 1 Bkt	Bintang 1	37
12	Hotel Limas	Rika Lina, B. Benny.SA	Jl. Kesehatan No. 34 Bkt	Bintang 1	47
13	Hotel Kharisma	Yudi Eka Putra	Jl. Jend. Sudirman No. 57 Bkt	Bintang 1	50
14	Hotel Gallery	Dodi Safarido	Jl. H. Agus Salim No.	Bintang 1	34

			25 Bkt		
15	Bunda	H. Asril	Jl. Panorama No. 6	Bintang 1	34
16	Hotel Asia	Michael Puji Astomo	Jl. Kesehatan No. 38 Bkt	Melati	41
17	Hotel Sari	Hj. Kasnidar	Jl. Yos Sudarso No. 07 Bkt	Melati	13
18	Hotel Sumatera	Jimmy Azwari, SH	Jl. Setia Budi No. 16. E Bkt	Melati	8
19	Hotel Indria	Dra. Indira Hasan	Jl. H. Agus Salim No. 1	Melati	32
20	Hotel Minang	Ramayan Anwar, Dra. Hj. Wardiana MM	Jl. Panorama No. 22 Rt 002/01	Melati	8
21	Hotel Singgalang	Hendri Ramali, Amril Ramali	Jl. A. Yani No. 130 bkt	Melati	8
22	Hotel Citra	Tuty Suryani Sofyan, SH	Jl. Guru Hamzah No. 1 Bkt	Melati	7
23	Hotel Asri	H.Harmaini	Jl. M. Syafei No. 14	Melati	24
24	Hotel Sakato	H. Murni Yahya, H. Syamsu Bahar, SH	Jl. Urip Sumaharjo No. 3 Bkt	Melati	13
25	Hotel Orchid	Rusli Gazali	Jl. T. Umar	Melati	14

			No. 11 Bkt		
26	Hotel Sitawa Sidingin	Maryam Djamil/Zulkifli Ardi	Jl. Dr. A. Rifai No. 19 Bkt	Melati	13
27	Hotel Agung	H. Hardi Bahar	Jl. Batang Agam No. 6	Melati	19
28	Hotel Ambun Suri	Ny. Anismar Asri	Jl. Panorama No. 2 Bkt	Melati	31
29	Hotel Asean	Hj. Nuzul Fiakti	Jl. Teuku Umar No 13 B, Bkt	Melati	10
30	Hotel Kartini	Ny. Enny	Jl. T. Umar No. 6 Bkt	Melati	9
31	Hotel Pemandangan	Wirako Anggriawan, Bernardus Harris	Jl. Yos Sudarso no. 31 Bkt	Melati	10
32	Hotel Cindua Mato	Ainun Nain	Jl. Cindua Mato No. 96 Bkt	Melati	8
33	Hotel Singgalang Indah	Anito	Jl. A. Yani No. 130 Bkt	Melati	15
34	Hotel Surya	Firdaus N.	Jl. A. Karim No. 7 Bkt	Melati	23
35	Hotel Murni	H.Zubaidah	Jl. A. Yani no. 115	Melati	9
36	Hotel Tigo Balai	Agus Salim	Jl. A. Yani No. 100 Bkt	Melati	14
37	Hotel Graha Muslim	Harimas As Hasbullah	Jl. Hamka No. 90 Bkt	Melati	18

38	Hotel Wisata	H.Juwar. HS	Jl. M. Syafei No. 1 Bkt	Melati	26
39	Hotel Villa Rosyan	Dra. Indriani	Jl. Ombilin No. 9A Bkt	Melati	5
40	Hotel Antokan	Drs. Faisal	Jl. P. Kemerdeka an No. 8 B Bkt	Melati	10
41	Hotel Dewi Kembar	H. Mardjohan Ahmad	Jl. By Pass Koto Dalam Bkt	Melati	15
42	Hotel Jogja	Nasroen Ilyas	Jl. P. Kemerdeka an No. 17	Melati	29
43	Hotel Dahlia	Ratna Yusti	Jl. A. Yani No. 58 Bkt	Melati	12
44	Hotel Nirwana	Darmansyah	Jl. A. Yani No. 113	Melati	6
45	Hotel Srikandi	Ajie Sutiono	Jl. A. Yani no. 117 Bkt	Melati	26
46	Losmen Selamat	Nurmatias Pangulu	Jl. A. Yani No. 19 Bkt	Melati	12
47	Hotel Villa 2000	Syaiful Rahim Hilmy	Jl. Batang Masang No. 97 Bkt	Melati	11
48	Batang Sianok	Dudi Prawoto, Johndry RS	Jl. S.Hatta No. 73	Melati	22
49	Hotel Nikita Palace	H. Aidil Azwar	Jl. S. Hatta, Garegeh Bkt	Melati	17

50	Hotel D'Enam	Dedi Antoni	Jl. Yos Sudarso No.4	Melati	8
51	Hotel Imran	Fazrul Kalin	Jl. Panorama No. 10 Bkt	Melati	30
52	Hotel Yuriko	Hj. Yurni Zulkarnain, SH	Jl. Sudirman No. 7 Bkt	Melati	30
53	Hotel Muslim	Riswaldi, SE/ Rizki Pratama	Jl. S. Hatta No. 90 Bkt	Melati	15
54	Home Stay Merdeka	Sukmi Warni	Jl. Dr. A. Rivai No. 20 Bkt	P.Wisata	6
55	Hotel Mitra Arena	Dhipa Arkhend	Jl. S. Hatta No. 30 Bkt	Melati	18
56	Pondok Wisata Rizneta	Mulyadi	Jl. S. Hatta No. 36	P.Wisata	4
57	Rajawali	Yanna Syamsiar	Jl. A. Yani No. 152	P.Wisata	7
58	Hotel Yany	Johny Yusuf Laseno	Jl. A Yani No. 101 Bkt	P.Wisata	5
59	Hotel Maison	Wandy Susilo Chandra	Jl. Ahmad Karim No. 12 Bkt	Melati	24
60	Edotel	Kepsek SMKN 2 Bkt	Jl. Syekh M. Jamil Djambek	Melati	19

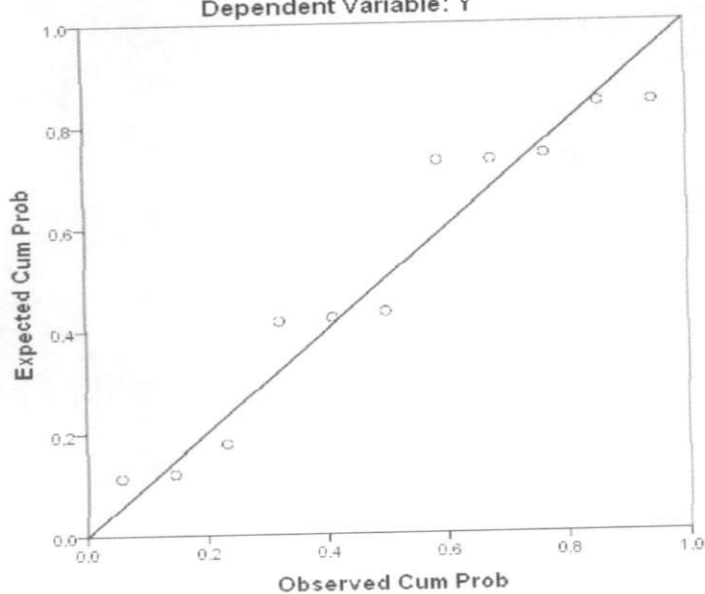
3. Hasil SPSS Output SPSS untuk statistik deskriptif

Descriptive Statistics

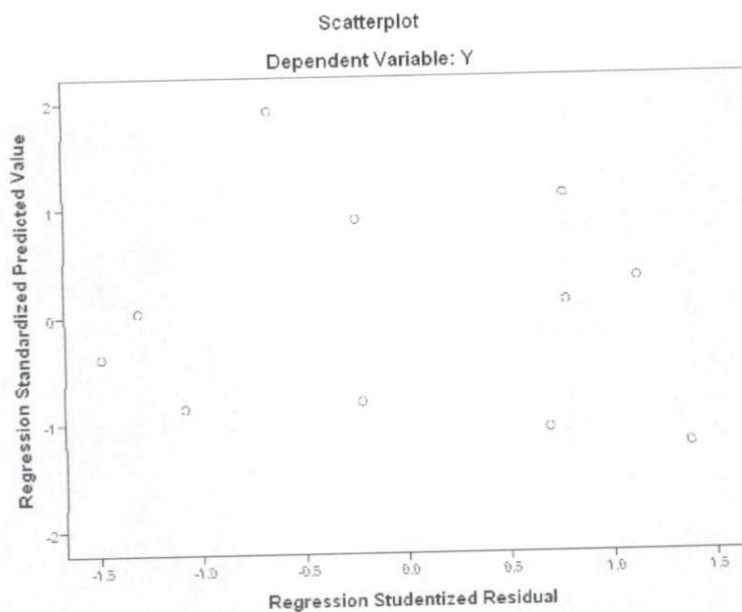
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	11	1923019129	6308002760	3600774719,27	1508813007,808
X1	11	155312	389005	268346,36	78466,494
X2	11	49	61	54,91	3,807
X3	11	1189	1593	1298,27	118,377
Valid N (listwise)	11				

4. Hasil SPSS untuk Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



5. Hasil SPSS untuk Uji Heteroskedasitas



6. Hasil SPSS untuk Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
X1	,142	1,022
X2	,211	1,733
X3	,207	1,826

7. Hasil SPSS untuk Uji Autokorelasi Output

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,969 ^a	,940	,914	1,33278	1,714

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

8. Hasil SPSS untuk Uji hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,969 ^a	,940	,914	1.33278

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	213.908	3	7.130	36.317	.000 ^b
	Residual	137.432	7	1.963		
	Total	351.340	10			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant).X3,X2,X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.789	.387		-,721	,495
X1	1.148	.4731	,774	3,144	,016
X2	7.090	.320	-,179	-,885	,004
X3	4.845	.674	,380	1,863	,003